

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG) PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN NGANJUK

Restu Gustiono

*Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kadiri, Indonesia*

Email Korespondensi: Restugustiono94@gmail.com

Submitted: 11-02-2025 | Accepted: 22-05-2025 | Published: 23-05-2025

Kata Kunci: Efektivitas; E-katalog; Pengadaan Barang dan Jasa	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas penerapan aplikasi katalog elektronik (e-katalog) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan aplikasi e-katalog. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Dengan teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Kabupaten Nganjuk. Dengan hasil penelitian yang di dapat adalah penerapan aplikasi e-katalog belum efektif. Hal demikian terjadi lantaran ada pengadaan barang/jasa yang belum dilakukan melalui e-katalog, sedangkan barang/jasa yang diperuntukan telah tercantum di e-katalog. Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kompetensi SDM pengelola pengadaan bisa dari PPK, PPBJ maupun penyedia yang menyebabkan proses pengadaan yang seharusnya dapat dilakukan melalui e-katalog namun tidak dapat dilaksanakan. Sistem e-katalog yang sering mengalami <i>downtime</i> , <i>bug</i> atau <i>error</i> , serta terkadang masalah koneksi internet. Faktor yang menjadi pendukung penerapan e-katalog adalah SDM yang handal dan infrastruktur sistem e-katalog yang stabil.
Keywords: Effectiveness; E-catalog, Procurement of goods and services.	Abstract <i>This study aims to describe and analyze the effectiveness of the implementation of electronic catalog applications (e-catalogs) in the procurement of government goods and services in Nganjuk Regency and to determine what factors inhibit and support the implementation of e-catalog applications. The research method used by researchers is qualitative. With data analysis techniques using qualitative descriptive methods. The location of the study is in Nganjuk Regency. The results of the study obtained are that the implementation of e-catalog applications is not yet effective. This happens because there is procurement of goods/services that have not been carried out through e-catalogs, while the goods/services intended have been listed in the e-catalog. The inhibiting factor is the lack of competence of procurement management human resources from PPK, PPBJ or providers which causes the procurement process that should be able to be carried out through e-catalogs but cannot be implemented. The e-catalog system often experiences</i>

downtime, bugs or errors, and sometimes internet connection problems. The factors that support the implementation of e-catalogs are reliable human resources and a stable e-catalog system infrastructure.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi elemen penting dalam mendukung tercapainya pembangunan suatu negara. Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang terus tumbuh, kebutuhan material dan non material pembangunan tersebut dipenuhi melalui proses pengadaan barang dan jasa (Fachrudin & Fanani, 2024). Sebelum diberlakukannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara konvensional. Konvensional berarti pengguna barang dan jasa dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan maupun pengguna barang dan jasa dipandang sebagai suatu kelemahan karena kurangnya transparansi dan kontrol yang dapat menciptakan celah bagi kegiatan korupsi, yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah (Septianingsih, 2022).

Untuk mencapai prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan perlu dilakukan secara elektronik (Novitaningrum, 2014). Saat ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan sistem pengadaan elektronik atau dikenal sebagai e-procurement. E-procurement merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyelenggarakan pengadaan melalui sistem berbasis digital. Implementasi pengadaan elektronik ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mematuhi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pengadaan daring, e-procurement berperan penting dalam membantu pemerintah mengelola pengeluaran belanja negara, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Delmana, 2019). Dalam sistem e-procurement juga tersedia mekanisme pembelian barang dan jasa secara elektronik (e-purchasing) yang memanfaatkan katalog elektronik (e-katalog) (Faisol et al., 2014).

E-katalog adalah platform digital yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempermudah memenuhi kebutuhan barang dan jasa. E-katalog menjadi solusi untuk

menciptakan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengadaan pemerintah. E-katalog diharapkan mampu memberikan peluang yang setara bagi para penyedia barang dan jasa untuk berpartisipasi dalam persaingan pengadaan yang berlangsung secara transparan dan adil (Agasi et al., 2020). Pemanfaatan katalog elektronik dapat meminimalkan potensi interaksi langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, menghemat waktu dan biaya, serta mendukung akuntabilitas keuangan selama proses pelaksanaan (Zein & Septiani, 2024). Penerapan e-katalog melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, pengelola pengadaan, pejabat pembuat komitmen, serta para pemasok barang dan jasa. Setiap unit bisnis dalam suatu organisasi pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengadaan, sehingga keberadaan e-katalog menjadi inisiatif penting bagi seluruh elemen organisasi dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (Katharina, 2021). Dengan karakteristik tersebut, e-katalog dinilai sebagai salah satu inisiatif e-government yang paling efektif dalam menghadirkan dampak nyata berupa transparansi dan efisiensi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting et al., 2021), pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue lokal masih belum berjalan secara efektif karena di LPSE Kota Tanjungpinang sebagian proses pengadaan masih dilakukan secara manual. Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat, tantangan, dan keterbatasan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan aplikasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam penerapan aplikasi e-katalog pada pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian ilmiah dan kemajuan ilmu pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya melalui pemanfaatan katalog elektronik, serta menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan di Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan tujuan memahami secara mendalam, menggambarkan, menjelaskan, serta merinci permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal peneliti yang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi katalog elektronik (e-katalog) di daerah tersebut masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, sebagian besar data dan sumber informasi terkait pengadaan barang dan jasa dapat diakses serta diamati secara langsung di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Fokus penelitian didasarkan pada realitas penerapan e-katalog di Kabupaten Nganjuk yang belum sejalan dengan tujuan dari penerapan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta belum sesuai dengan teori efektivitas yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena e-katalog memiliki manfaat berupa transparansi pengadaan, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan akurasi data. Maka sudah seharusnya jika setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sudah tercantum di e-katalog wajib pelaksanaannya melalui e-katalog.

Data yang akan peneliti analisis berupa hasil wawancara, nantinya akan peneliti ukur menggunakan teori efektivitas dari (Nofriansyah, 2018) dengan indicator, Pertama, pemahaman program, yaitu sejauh mana program dapat direalisasikan sehingga mudah dipahami dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Kedua, ketepatan sasaran, yang menekankan pentingnya pengamatan langsung untuk memastikan bahwa program telah menyasar kelompok atau tujuan yang sesuai. Ketiga, ketepatan waktu, di mana sebuah program dianggap efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, pencapaian tujuan, yang mengukur sejauh mana program berhasil mencapai target yang telah dirumuskan sejak awal. Terakhir, perubahan nyata, yaitu sejauh mana program mampu menghadirkan dampak konkret yang menunjukkan bahwa aturan dan rencana yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal.

Menurut (Sugiyono, 2008), data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung baik dari individu maupun kelompok, melalui komunikasi lisan ataupun tertulis. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah manusia, yang dapat memberikan informasi melalui jawaban lisan saat wawancara atau jawaban tertulis melalui pengisian angket. Adapun kualifikasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 2) Memiliki kepentingan dalam penggunaan katalog elektronik (e-katalog) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 3) Berkepentingan dalam menentukan keputusan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tabel 1.
Daftar Informan

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	AM	Laki-Laki	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	RJ	Laki-Laki	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	SI	Perempuan	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
4.	AW	Laki-Laki	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
5.	RO	Perempuan	Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah
6.	WI	Perempuan	Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup data yang diperoleh melalui berbagai bahan bacaan dan dokumen resmi, seperti berita, peraturan

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Secara spesifik, data sekunder yang digunakan meliputi data perencanaan dan capaian pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk melalui e-katalog pada periode 2021–2024. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah regulasi penting, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa melalui Implementasi E-Katalog.

Dalam sebuah survei penelitian, tidak selalu diperlukan untuk meneliti seluruh individu yang terdapat dalam populasi objek penelitian. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data harus dilaksanakan dengan teliti dan mengikuti prosedur serta karakteristik yang berlaku dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi langsung merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengandalkan pengamatan mata secara langsung, tanpa bantuan alat standar khusus untuk keperluan tersebut. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data dari subjek, baik yang mampu berkomunikasi secara verbal maupun yang tidak bersedia atau tidak mampu berkomunikasi secara verbal.

2) Wawancara

Pengumpulan data wawancara dengan informan dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui metode e-katalog di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata setelah program e-katalog di implementasikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3) Dokumen

Hasil penelitian akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi apabila diperkuat dengan dukungan berupa dokumentasi foto maupun karya tulis akademik yang relevan. Dalam pengumpulan data dokumen, peneliti menghimpun bukti berupa foto-foto hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk.

Keterpercayaan data merupakan salah satu teknik penting yang digunakan untuk memastikan bahwa penelitian kualitatif memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya menjaga keterpercayaan ini, peneliti menempuh sejumlah langkah sebagai berikut.

1) Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan mengacu pada upaya peneliti untuk tetap berada di lapangan penelitian hingga mencapai titik kejemuhan data, yaitu ketika tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh. Dengan memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan, tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan dapat semakin ditingkatkan, sehingga validitas hasil penelitian pun lebih terjamin.

2) Ketekunan Pengamatan

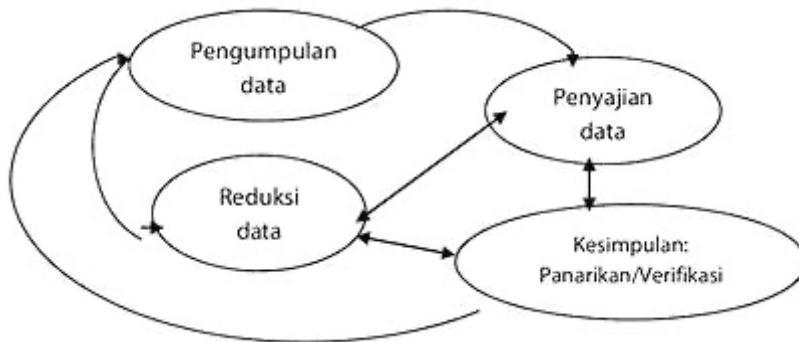
Ketekunan pengamatan bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan unsur-unsur penting dalam suatu situasi yang memiliki relevansi kuat dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti. Setelah unsur-unsur tersebut ditemukan, peneliti kemudian memfokuskan perhatian secara mendalam dan rinci pada aspek-aspek tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.

3) Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian melalui penggabungan berbagai metode, sumber data, atau sudut pandang. Melalui penerapan triangulasi, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih kuat dan komprehensif karena tidak bergantung pada satu perspektif saja, sehingga kebenaran data yang diperoleh menjadi lebih dapat diterima secara ilmiah.

Menurut Sugiyono (2020, hlm. 132), analisis data adalah proses menyusun dan mengolah data secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, pengorganisasian ke

dalam berbagai kategori, penguraian menjadi unit-unit, penyusunan sintesis, pembentukan pola, hingga pemilihan aspek-aspek penting yang perlu dipelajari, untuk kemudian disimpulkan agar mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Model analisis yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: (Miles, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan E-Katalog Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Nganjuk

Penerapan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk yang memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pada proses pengadaan barang dan jasa dapat diketahui melalui indikator:

a) Indikator Pemahaman Program

Hasil wawancara peneliti kepada pengelola pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa) telah mengetahui apa itu e-katalog beserta cara pemanfaatannya. Hal demikian dapat terjadi karena pengelola pengadaan telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis serta mempraktekkan pemanfaatan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk.

b) Indikator Ketepatan Sasaran

Hasil wawancara bersama informan menunjukkan bahwa keberadaan e-katalog sudah relevan dan tepat sasaran karna bertujuan untuk menciptakan proses pemilihan penyedia yang sesuai dengan prinsip transapran, efisien, efektif dan akuntabel, karena ada banyak pilihan penyedia dan produk dengan harga terbaik. Namun dalam implementasinya terdapat kekurangan seperti masih ada celah tindak kecurangan dan masih terdapat pelaku pengadaan yang belum benar-benar memahami aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya tentang e-katalog.

c) Indikator Ketepatan Waktu

Implementasi e-katalog untuk barang dan jasa lainnya sudah tepat waktu, dilaksanakan tahun 2021 setelah Peraturan tentang e-katalog ditetapkan. Namun untuk pekerjaan konstruksi baru di sosialisasikan dan dilaksanakan pada tahun 2022. Karena diperlukan kaji ulang dan studi tiru serta penelaahan yang lebih lanjut pada pekerjaan konstruksi yang sifat pekerjaannya lebih kompleks dan berisiko tinggi dibandingkan dengan pengadaan barang maupun jasa lainnya.

d) Indikator Tercapainya Tujuan

Hasil reduksi data dari informan yang memahami pengadaan barang dan jasa didapatkan hasil bahwa penerapan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk ada beberapa perangkat daerah yang masih melakukan pengadaan barang/jasa diluar e-katalog. Faktor kurangnya kompetensi dan komitmen sumber daya pengelola aplikasi e-katalog dan sistem e-katalog yang sering mengalami gangguan menjadi salah satu penyebab utamanya.

Tabel 2. Data Hasil Observasi - Perbandingan antara Perencanaan dengan Realisasi PBJ melalui e-purchasing / e-katalog

PENGADAAN MELALUI E-PURCHASING / E-KATALOG DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK									
N o	Perencanaan				Pemilihan				DI
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	29,37 %	34,57 %	43,12 %	81,20 %	0,81 %	33,85 %	39,55 %	77,38 %	

Sumber: AMEL di Apikasi LPSE 2024

Data diatas merupakan data pengadaan barang dan jasa yang telah di proses melalui e-katalog sepanjang tahun 2021-2024. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2024 prosentase perencanaan pengadaan melalui e-katalog selalu lebih besar daripada nilai pelaksanaan pemilihan pengadaan melalui e-katalog. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidak kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Pengadaan yang seharusnya dilakukan melalui e-katalog pada kenyataannya masih ada yang dilakukan diluar e-katalog.

e) Indikator Perubahan Nyata

Efektivitas penerapan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum efektif. Karena dari jawaban informan baik dari PPK, PPBJ dan Penyedia menyampaikan bahwa indikator tercapainya tujuan sub indikator “apakah seluruh Perangkat Daerah di Kab. Nganjuk sudah menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog”, di peroleh jawaban ada beberapa Perangkat Daerah yang belum menerapkan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa. Hal demikian tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 pasal 38 yang mengatur tentang metode pengadaan barang /jasa pemerintah. Bawa pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*, atau bisa dikatakan metode *e-purchasing* menjadi prioritas pengadaan dibandingkan dengan metode yang lainnya. Selain itu, kondisi tersebut juga tidak sejalan dengan Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui implementasi e-katalog. Surat edaran tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan sebanyak mungkin produk, seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan, jasa kebersihan, serta produk lain dari pelaku usaha lokal, tersedia di dalam katalog elektronik sehingga tidak lagi dilakukan pembelanjaan di luar skema *e-purchasing* (katalog elektronik dan toko daring).

Faktor Penghambat Penerapan E-Katalog pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Nganjuk

a) *Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)*

SDM dapat menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-katalog, karena berbagai alasan yang terkait dengan keterampilan, pengetahuan, kesiapan mental, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Penerapan sistem e-katalog yang berbasis teknologi digital membutuhkan keterlibatan SDM yang terampil dan siap menghadapi tantangan baru, baik di tingkat pemerintah maupun penyedia barang dan jasa.

Kurangnya kompetensi SDM pengelola pengadaan barang dan jasa khususnya untuk pengelolaan e-katalog di Nganjuk menyebabkan proses pengadaan yang seharusnya dapat dilakukan melalui e-katalog, namun pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Beberapa alasan hasil pengamatan peneliti mengapa SDM bisa menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-katalog adalah karena kurangnya pemahaman dan komitmen pemanfaatan e-katalog, keterbatasan keterampilan teknologi, dan resistensi terhadap perubahan.

b) Lemahnya infrastruktur atau sistem e-katalog

Meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur digitalisasi pengadaan, masih ada kelemahan yang sering kali muncul pada sistem e-katalog. Ini menjadi penghambat dalam penerapan e-katalog di Kabupaten Nganjuk secara merata. Gangguan sistem yang sering terjadi menurut informan dan hasil pengamatan peneliti seperti: 1) *Downtime* (waktu tidak aktif). Sistem e-katalog bisa mengalami *downtime* atau tidak dapat diakses untuk sementara waktu. 2) *Bug* atau *error* dalam sistem. pengguna bisa menemui *bug* atau kesalahan teknis dalam aplikasi, seperti kesalahan perhitungan harga, kesalahan dalam pemrosesan data, atau masalah dalam pemilihan barang/jasa yang diinginkan.

Faktor Pendukung Penerapan E-Katalog pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Nganjuk

a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal

Pengelola pengadaan baik dari perangkat daerah (PPK), bagian pengadaan barang dan jasa (PPBJ) maupun dari penyedia jika sudah memiliki kompetensi dan komitmen untuk menerapkan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan e-katalog. Pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang handal memiliki beberapa aspek seperti: 1) Kompetensi pengelola pengadaan. Mengacu pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh pengelola pengadaan dalam mengelola sistem e-katalog. Pengelola yang berkompeten dalam hal ini berarti memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pemahaman aplikasi e-katalog. 2) Komitmen. Pengelola pengadaan yang berkomitmen tidak hanya terpaku pada tugas administratif, tetapi juga berfokus pada pencapaian tujuan besar pengadaan, yakni memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan proses yang efisien. Komitmen ini mendorong pengelola untuk terus menerus meningkatkan sistem dan memastikan sistem e-katalog digunakan secara maksimal.

b) Infrastruktur Sistem E-Katalog yang Stabil

Infrastruktur atau sistem e-katalog menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Infrastruktur yang stabil dan sistem yang terintegrasi dengan baik memastikan kelancaran proses pengadaan, mengurangi hambatan, serta mendukung pencapaian tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Infrastruktur dan sistem e-katalog dianggap penting karena dapat menjamin kelancaran proses sistem pengadaan, meningkatkan kepercayaan pengguna aplikasi e-katalog dan meningkatkan akurasi proses pengadaan. Sistem e-katalog yang stabil dan tidak sering *error* adalah faktor fundamental yang mendukung efektivitas penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-katalog pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum efektif. Hal demikian terjadi lantaran indikator tercapainya tujuan efektivitas belum dapat dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 prioritas pengadaan barang/jasa adalah melalui e-purchasing (e-katalog). Namun masih ada perangkat daerah yang belum menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog sedangkan barang/jasa yang diperuntukan telah tercantum di e-katalog.

Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kompetensi SDM pengelola pengadaan barang dan jasa. Keterbatasan pengelola pengadaan dalam memanfaatkan sistem e-katalog, serta resistensi terhadap perubahan teknologi menjadi sebab proses pengadaan yang seharusnya dapat dilakukan melalui e-katalog berakhir tidak dapat dilaksanakan. Sistem e-katalog yang sering mengalami *downtime*, *bug* atau *error*, serta terkadang masalah koneksi internet dapat menghambat proses penerapan e-katalog di Kabupaten Nganjuk.

Faktor pendukung penerapan e-katalog di Kabupaten Nganjuk adalah pengelola pengadaan yang memiliki kompetensi dan komitmen. Mereka akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pada pengadaan barang dan jasa, mampu mengatasi masalah teknis dalam penggunaan sistem, seperti kesalahan dalam pemrosesan data, kesulitan akses, atau integrasi dengan sistem lain. Mereka yang berkomitmen akan melaksanakan pemanfaatan e-katalog sesuai dengan kebijakan yang

berlaku tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem e-katalog yang stabil dapat memastikan kelancaran proses pengadaan, mengurangi hambatan, serta mendukung pencapaian tujuan pengadaan yaitu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengelola pengadaan baik dari perangkat daerah, pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa setelah mendapatkan pelatihan tentang penerapan e-katalog agar berkomitmen dalam memanfaatkan e-katalog sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Diharapkan dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog dapat berjalan secara efektif. Perlu adanya *reward* dan *punishment* bagi pengelola pengadaan yang melaksanakan atau tidak melaksanakan pembelian barang/jasa melalui e-katalog.
2. Hendaknya LKPP sebagai Lembaga pusat pengadaan barang/jasa pemerintah dapat meningkatkan kapasitas server e-katalog agar mampu menangani pengguna yang banyak, terutama saat trafik tinggi. Pertimbangan penggunaan server dengan kemampuan *auto-scaling* untuk menyesuaikan beban kerja secara dinamis. Melakukan audit kode sumber sistem untuk mencari dan mengatasi potensi *bug* atau kesalahan pemrograman yang dapat menyebabkan sistem sering error. Peningkatan keamanan jaringan untuk melindungi sistem dari potensi peretasan yang dapat menyebabkan kerusakan atau *downtime*. Pastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem e-katalog terkelola dengan baik, termasuk pembaruan informasi produk yang konsisten dan tepat waktu.

REFERENSI

- Agasi, A. P., Sitorus, A. A. N. S., Prasalengga, A., Inayati, A., Indriyani, A. F., Dewi, C. P., Sari, E. Y. J. M., Kirana, M. C., Fauzia, S. N., & Rumah, P. P. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purcashing Terhadap Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 47–62.
- Fachrudin, I., & Fanani, I. (2024). IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING) DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 123–135.

- Faisol, I. A., Tarjo, T., & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 71–90.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & ... (2021). Literasi Digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. ... *Masyarakat Dan* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/view/10869>
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. UI-Press.
- Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dalam kelurahan*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aD1IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA117&dq=pemberdayaan+masyarakat&ots=ImbDcWEYyl&sig=ERd5R9OEdtKX0P7bzGNu992hmdA>
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- Septianingsih, C. A. (2022). *Analisis Perencanaan Pengadaan Dan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. PT. Alfabet.
- Zein, H. M. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.